

**KEBIJAKAN PERANCIS KEMBALI BERGABUNG
DALAM STRUKTUR KEPEMIMPINAN
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)
TAHUN 2009**

**Lia Safitri
Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP. M.Si**

Abstract

This research explains about France's policy return to join into the North Atlantic Treaty Organization command structure. France is one of the twelve NATO founding countries, but on 1966 France stated to discharge from the command structure of NATO. On 2009, France stated to reintegrated into the command structure of NATO. This research explains the France's interest coming back to the command structure of NATO. This research intended to show that France policy for reintegration into the NATO command structure is to protect the France's national interest especially the defence-security interest, and the France's military, the France reintegration into NATO command structure policy also to compensate the USA domination on NATO command council. France is re-active in the NATO command structure counted since 2009. The France return into NATO command structure is one of the implication of France foreign policy execution which contained in France White Book about the France defence and security.

Keywords : Foreign Policy, National Interest, Decision Making Theory, Realism Perspective

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kebijakan negara Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) setelah keluarnya Perancis pada tahun 1966. Perancis merupakan salah satu Negara yang memiliki kekuatan besar bagi NATO, namun pada saat pemerintahan presiden Perancis, Charles De Gaulle negara Perancis menyatakan keluar dari struktur kepemimpinan NATO.

NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) merupakan Organisasi regional yang dibentuk tahun 1949 untuk memberikan bantuan keamanan timbal balik bagi Negara anggotanya di kawasan Atlantik Utara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjangkau tujuan keamanan melalui tindakan bersama sesuai dengan piagam perjanjian Atlantik Utara, dan berguna sebagai kerangka untuk melakukan kerjasama militer, politik, ekonomi dan sosial.¹

¹Jack C. Plano dan Roy Olton. 1990, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin, hal. 276

Pada awal pembentukannya, NATO beranggotakan dua belas negara penandatangan, yaitu Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Belgia, Denmark, Italia, Kanada, Luxemburg, Norwegia, Portugal, dan Islandia. Dua negara yang disebut paling awal –Perancis dan Amerika Serikat, merupakan dua negara yang paling memegang peranan penting dalam memobilisasi keamanan internasional baik melalui NATO dan PBB, dan merupakan dua di antara lima negara (Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Cina, dan Inggris) pemegang Hak Veto di PBB.

Secara struktural keanggotaan NATO, Perancis merupakan salah satu dari dua belas negara pemrakarsa berdirinya NATO. Pada tahun 1966 Perancis menyatakan diri keluar dari struktur kepemimpinan NATO walaupun masih memiliki wakil dalam NATO. Negara Perancis tidak sepenuhnya keluar dari NATO, tetapi Perancis tidak tergabung dalam struktur kepemimpinan NATO. Alasan negara Perancis keluar pada maret 1966 tersebut, dikarenakan presiden Perancis pada saat itu Presiden Charles de Gaulle tidak ingin ikut campur dalam perang.

Terbentuknya NATO disebabkan karena adanya kekhawatiran negara-negara Eropa barat dan Amerika akan ancaman keamanan dari dominasi Uni Soviet di wilayah Eropa yang dikhawatirkan dapat mengancam integritas Eropa. Pembentukan NATO di wilayah atlantik utara ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan negara-negara anggotanya. Pada awal pembentukan NATO, negara Amerika dan Perancis saling bekerjasama untuk mempertahankan aliansi negara-negara Eropa Barat, namun, pada tahun 1958 terjadi krisis kekuasaan dalam badan NATO, dimana negara Perancis merasa hubungan khusus antara Amerika –Inggris dapat mengancam kedudukan Perancis di NATO. Presiden De Gaulle menyatakan Perancis secara resmi mundur dari struktur komando NATO dan menutup markas besar NATO di Perancis pada maret 1966 karena De Gaulle tidak ingin Perancis terlibat dalam perang yang tidak diinginkan.

Terpilihnya Nicolas Sarkozy menjadi Presiden pada tahun 2007 merubah politik luar negeri para presiden pendahulunya dengan menyatakan akan bergabung kembali dengan NATO.² Banyak dari warga Perancis yang pada awalnya meragukan bahkan menentang keputusan Presiden Sarkozy karena dianggap melepaskan independensi Perancis dari kekuatan Amerika Serikat.

Pada tanggal 17 Maret 2009 Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO atau Dewan Atlantik Utara yang memiliki otoritas tertinggi dalam NATO yang terdiri

² Frank Reinout, Perancis Ingin NATO Yang Lain, terdapat dalam <http://www.renesi.in>. tanggal 12 Maret 2009

dari kepala pemerintahan dari negara-negara anggota NATO. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengumumkan negaranya akan kembali aktif di jajaran komando militer NATO setelah keluar selama 40 tahun dari pakta pertahanan tersebut. Sarkozy mengumumkan kebijakan tersebut dalam pidato di depan para ahli pertahanan di Paris³

Teori Pembuat Keputusan dalam Kebijakan Perancis

Kebijakan Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO terkait dengan kepentingan nasional Perancis kembali bergabung kembali dalam struktur komando NATO tersebut. Konsep kepentingan nasional akan menjadi erat kaitannya dengan penelitian ini, karena kepentingan nasional setiap negara akan mempengaruhi kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara tersebut. Dalam penelitian ini, teori yang signifikan sangat diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti. *Decision Making Theory* merupakan teori yang penulis gunakan dalam menganalisa mengenai kebijakan Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO.

Menurut William D. Coplin dalam teori pembuat keputusan⁴ yang mengatakan bahwa apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan peran dari pemimpin Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (pembuat keputusan) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi).

Tindakan politik luar negeri tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi pembuat keputusan. **Pertama** adalah kondisi politik di negara tersebut termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya, dalam penelitian ini, kondisi politik yang mempengaruhi Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO adalah kondisi politik domestik yang menginginkan perkembangan dalam bidang organisasi internasional dan pengaruh di luar negeri yang kemudian tertuang dalam buku putih Perancis⁵ yang kemudian diaplikasikan menjadi acuan politik luar negeri Perancis.

³ “Setelah 40 Tahun, Perancis Kembali ke Pangkuan NATO”, diakses pada tanggal 15 Desember 2009, tersedia pada <http://surabayaweb.com>.

⁴ William D. Coplin, 1992, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 29-30.

⁵ Buku putih merupakan salah satu bentuk kebijakan dari politik luar negeri Perancis yang dirilis pada juni 2008 demi melindungi kepentingan nasional Perancis terutama dalam bidang pertahanan luar negeri, pertahanan domestic dan masalah keamanan Perancis, dalam “French White Paper on Defence and National Security, June 2008”,

Kedua, situasi ekonomi dan militer di Negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Kondisi militer yang memerlukan perkembangan pesat menyangkut masalah letak geografis Perancis yang notabeneanya berada di wilayah Eropa dan keinginan Perancis untuk membawa Eropa menjadi wilayah yang memiliki militer dan perekonomian yang tinggi, sehingga Perancis memerlukan kekuasaan di NATO untuk mencapai kepentingan Perancis menjadi negara dengan kekuasaan militer yang dipertimbangkan di dunia.

Ketiga, konteks internasional atau situasi di Negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kondisi atau situasi internasional yang mempengaruhi Perancis mengambil keputusan kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan Perancis adalah sebagai *defense* Perancis di mata internasional terutama di bidang militer dan menjawab tantangan dari persaingan antara Amerika Serikat dan Perancis yang selama ini secara tidak langsung terjadi di dalam badan internal NATO. Selain itu, Perancis juga menginginkan adanya pengurangan atau penghapusan dominasi Amerika Serikat di NATO seperti yang terjadi selama ini. Melalui pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Presiden Nicholas Sarkozy yang pada saat itu memerintah negara Perancis memutuskan untuk mengambil kebijakan kembali bergabung dalam struktur komando NATO.

Politik Luar Negeri Perancis

Semenjak abad ke-18, tujuan politik luar negeri telah menjadi prioritas utama bagi Perancis dimana Perancis mengambil kebijakan luar negeri demi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Perancis merupakan negara yang sangat menghargai nilai-nilai kemerdekaan yang sangat tinggi. Setelah terjadinya Revolusi Perancis pada tahun 1789, terjadi banyak perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan sistem politik di Perancis termasuk sistem politik luar negeri Perancis. Pada masa kepemimpinan Presiden Charles De Gaulle, politik luar negeri Perancis menjadi panutan bagi diplomasi politik luar negeri Perancis selama beberapa dekade. Prinsip politik luar negeri independensi Perancis sampai saat ini masih tetap di aplikasikan dalam hubungan internasional Perancis. Perancis menggunakan prinsip independensi, tetapi perancis tidak melupakan prinsip-prinsip solidaritas antar negara baik regional maupun global.

Struktur Organisasi NATO dan Fungsinya

Struktur Organisasi NATO, pada prinsipnya terdapat dua organisasi dalam NATO yaitu militer dan sipil. Struktur organisasi militer dikepalai oleh Dewan Militer serta termasuk kelompok perencana Regional Amerika Serikat-Kanada dan tiga komando NATO, yaitu: SACEUR, CACLANT, dan CICHAN.

a. Dewan Atlantik Utara

Dewan atlantik utara merupakan badan pembuat kebijakan di NATO. Pertemuan dilakukan dalam badan Dewan Atlantik Utara setingkat menteri dua kali dalam setahun. Dewan berfungsi sebagai forum utama bagi diskusi –diskusi koordinasi di bidang politik dan kebijakan pertahanan. Dewan ini juga menyerahkan tugas dari beberapa komisi fungsional.⁶

b. Sekretaris Jendral

Sekretaris Jendral (Sekjen) NATO dapat juga disebut sebagai “kepala Eksekutif NATO”. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Atlantik Utara, DPC, Komisi Hubungan Pertahanan Nuklir dan kelompok Perencana Nuklir. Sekjen juga memimpin staf multinasional yang besar dan seluruh administrasi NATO di Brussel. Sekjen bertanggungjawab terhadap konsultasi awal dan langsung dalam aliansi.

c. Dewan Militer

Dewan militer merupakan salah satu badan tertinggi NATO yang bertanggung jawab terhadap pemberian rekomendasi dan petunjuk-petunjuk mengenai masalah militer kepada Dewan Atlantik Utara dan DPC. Dewan militer terdiri dari kepala-kepala staf angkatan bersenjata semua anggota-anggota NATO. Jabatan ketua Dewan Militer dipilih secara bergiliran berdasarkan abjad negara-negara anggota oleh Dewan Atlantik Utara untuk masa jabatan 2 sampai 3 tahun. Ketua komisi militer berhak menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat menteri dalam Dewan Atlantik Utara.

d. Komando NATO

Badan komando NATO terbagi atas tiga badan yaitu, Komando Sekutu Eropa (*ACE/Allied Command Europe*), Komando Sekutu Atlantik (*ACLANT/Allied Command Atlantic*), dan komando Penghubung (*CINCHAN/Channel Command*). Komando NATO bertanggung jawab untuk membangun rencana bagi wilayah geografis masing-masing negara

⁶ NATO Handbook. Chapter 7: Policy and Decision-Making [http]. Lihat: <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070102.htm> dalam Kusnadi, *Ibid* . hal 29

anggotanya untuk penentuan kebutuhan kekuatan dan bagi aturan-aturan latihan kekuatan di dalam komando mereka masing-masing.

e. Majelis Atlantik Utara

Majelis Atlantik Utara bertugas untuk mempromosikan ikatan-ikatan yang lebih erat antara negara-negara anggota NATO yang membuat Undang-undang. Majelis ini bertugas melalui lima badan yakni Badan Militer, Badan Ekonomi, Badan Pendidikan, Hubungan Kebudayaan dan Informasi, Badan Politik, dan Badan Teknik dan Ilmu Pengetahuan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh majelis Atlantik Utara ini nantinya ditujukan pada Dewan Atlantik Uni Soviet melalui Sekjen NATO.

f. Kelompok Eropa

Kelompok Eropa adalah perkumpulan informal yang terdiri dari para Menteri Pertahanan Belgia, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, dan Belanda, Norwegia, Portugal, Turki dan Inggris Raya yang terbentuk pada tahun 1968 dan bertujuan untuk membuat kerjasama Eropa yang lebih erat di dalam NATO. kelompok Eropa ini bertanggung jawab untuk mendukung usaha-usaha saling ketergantungan keamanan di antara negara-negara anggota melalui program perbaikan pertahanan Eropa dan kelompok program independen Eropa kebanyakan dari tujuan-tujuan ini diarahkan pada sistem persekutuan, komunikasi, pendukung logistic, proyek-proyek bantuan serta usaha-usaha untuk memperolehnya.⁷

Kepentingan Perancis di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)

Kepentingan Perancis di NATO tidak terlepas dari keikutsertaannya dalam berbagai operasi perdamaian yang dijalankan oleh NATO sejak tahun 1949. Sebagai salah satu negara pendiri NATO, Perancis telah banyak berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan NATO. Perancis merupakan negara yang paling intens dalam pengiriman pasukan luar negeri setelah Amerika Serikat pada NATO⁸ Perancis juga menjadi negara penting dalam berbagai reformasi kelembagaan NATO. Kepentingan Perancis di NATO menjadi agenda baru dalam politik luar negeri Perancis, khususnya di bidang pertahanan.

⁷ Kusnadi Hidayat *Pengaruh konflik Yunani-Turki Terhadap Program Kerja NATO(1974-1999)*,S1,Universitas Riau, 2005

⁸ Hugues Portelli, dkk, 2005, *France*, Paris: La Documentation Francaise; Ministere des Affaires etrangeres, hal. 210.

Sebagai salah satu anggota NATO, Perancis telah bekerja secara aktif dengan sekutu untuk beradaptasi di NATO, baik internal maupun eksternal dalam lingkungan pasca Perang Dingin. Dukungan Perancis dalam upaya modernisasi struktur kelembagaan NATO dan memimpin kontributor *NATO Response Force* (NRF) merupakan bagian dari implementasi kepentingan Perancis di NATO. Perancis tertarik untuk membangun kemampuan pertahanan Eropa di luar NATO, termasuk pengembangan kelompok tentara regu-cepat Uni Eropa dan menjadi tulang punggung bagi produksi militer Eropa.

Pada tahun 2009, Presiden Nicholas Sarkozy mendukung penuh pengembangan pertahanan Eropa untuk melengkapi dan memperkuat NATO, yang tujuan intinya tetap pada stabilisasi keamanan Trans-Atlantik. Presiden Nicholas Sarkozy telah menggaris bawahi komitmen Perancis untuk menyelesaikan misi NATO di Afghanistan di luar misi Trans-Atlantik.

Perancis memandang NATO sebagai simbol mata rantai strategi antara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada.⁹ Perancis adalah pemimpin di Eropa Barat karena ukurannya, lokasi, ekonomi yang kuat, keanggotaan dalam organisasi Eropa, postur militer yang kuat, dan diplomasi yang energik.¹⁰ Perancis umumnya telah bekerja untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik global Uni Eropa dan perannya dalam pertahanan Eropa. Ini dilihat dalam kerjasama Franco-Jerman dan pengembangan Kebijakan Umum Pertahanan dan Keamanan (*Common Security and Defense Policy / CSDP*) dengan anggota Uni Eropa lainnya sebagai dasar upaya untuk meningkatkan keamanan Eropa. Keterlibatan Perancis di berbagai organisasi internasional di atas, memberikan pengaruh lebih besar bagi Perancis untuk lebih leluasa dalam menentukan masa depan pertahanan Eropa. Pada sisi lain dengan semakin banyaknya keterlibatan Perancis di organisasi internasional, maka Perancis dituntut untuk lebih kerja keras dalam mencapai kepentingan nasional negaranya, terutama kepentingan nasional Perancis di NATO. Secara garis besar, kepentingan Perancis di NATO ialah:

*to take following steps, in keeping with the choices it made in 1996 to move toward a professional army and to define a new model for the armed forces that gives due consideration to the requirement for France's participation in European and Atlantic Alliances.*¹¹

⁹ Portelli, *Op. cit.*, hal. 198.

¹⁰ *Loc. cit.*

¹¹ Portelli, *Op. cit.*, hal 193.

Berangkat dari tujuan ini, maka Perancis dalam hubungannya dengan NATO menjalankan misi. **Pertama**, mempertahankan kebebasan Perancis untuk menentukan pilihan dan tindakan untuk memastikan bahwa Perancis tetap bebas untuk memilih apakah dalam setiap operasi akan terlibat dengan mitra dan atau dengan sekutu, serta mempertahankan kemampuannya untuk bertindak sendiri jika perlu; **Kedua**, mempertahankan pengaruhnya di aliansi dan koalisi negara Perancis, dimana Perancis bertindak sebagai “*framework nation*” untuk melaksanakan misi Eropa (hal ini dapat membantu negara-negara koalisi Perancis dalam melaksanakan “*framework nation*” sekaligus sebagai penuntun bagi negara Eropa lainnya untuk bersama menggunakan “*its own national headquarter staff*”, dan mempertahankan kemampuan militer yang memadai; **Ketiga**, mempertahankan kemutakhiran teknologi memastikan kredibilitas dalam mengontrol pencegahan nuklir, mengembangkan sumber daya yang tepat untuk perlindungan terhadap ancaman baru dan mempertahankan dasar produksi bagi industri pertahanan Eropa.

Kepentingan Perancis di NATO adalah terkhusus pada pertahanan kemanan dan kepemimpinan Perancis di NATO, sedangkan dalam ruang lingkup global yang lebih luas kepentingan Perancis tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga menyangkut seluruh nilai-nilai vital kepentingan Perancis. Termasuk meningkatkan pertahanan Eropa secara menyeluruh. Reformasi struktur dan postur kekuatan militer Perancis menjadi salah satu domain terpenting di NATO dan Eropa.

Kepentingan Perancis dalam bidang militer adalah untuk menjamin postur militer Perancis yang lebih baik. Doktrin militer Perancis didasarkan pada konsep kemerdekaan nasional, pencegahan nuklir, dan postur militer yang mapan. Untuk itu, revitalisasi struktur militer Perancis menjadi fokus utama dalam meningkatkan kapabilitas militer Perancis. Hal ini sesuai dengan Buku Putih yang dirilis oleh Perancis pada Juni 2008 yang menitikberatkan pada masalah pertahanan luar negeri, pertahanan domestik, dan masalah keamanan.¹² Buku Putih itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategi keamanan yang lebih komprehensif untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, mencerminkan lingkungan keamanan yang baru pada abad ke-21, dan untuk menguraikan proposal restrukturisasi untuk membuat militer Perancis lebih fleksibel, berteknologi maju, dan lebih mampu berkoordinasi dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan organisasi-organisasi multilateral seperti Uni Eropa, NATO, dan PBB.

¹² “French White Paper on Defence and National Security, June 2008”, http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2012 Pukul 10.00 WIB.

Keluarnya Perancis dari Struktur militer NATO, tidak berarti Perancis meninggalkan kepentingannya di NATO, melainkan untuk bisa lebih leluasa dalam mencapai tujuan tersebut di atas. Pada masa yang sama, Perancis memulai dan ikut berpartisipasi penuh dalam struktur politik kelembagaan NATO.¹³

Pada waktu Perancis berada di luar struktur integrasi militer NATO, maka pasukan Perancis yang tergabung dalam aliansi tetap ikut dalam operasi NATO, meskipun Perancis tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di NATO. Pada awalnya, perihal ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi Perancis. Perancis mengubah arah untuk mulai ikut dalam pengambilan keputusan pada setiap rencana operasi NATO. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Perancis untuk menaikkan postur kekuatan militer dan pertahanan di NATO. Selain itu, dominasi Amerika Serikat di NATO, hari ini dilihat berbeda oleh Perancis. Jika sebelumnya, dominasi Amerika Serikat dilihat sebagai bentuk “*psychology of dependent*” bagi Perancis di NATO, maka hari ini tampak berbeda bagi Perancis. Perancis melihat ketidak-terlibatan Perancis dalam setiap pengambilan keputusan di struktur integrasi militer NATO, secara otomatis mengurangi pengaruh Perancis dalam posisinya sebagai anggota NATO di Eropa. Dengan demikian mengurangi pula pengaruhnya di Eropa, “*More France in NATO means more Europe in the Atlantic Alliance*”¹⁴. Perancis harus ikut terlibat kembali dalam setiap pengambilan keputusan di struktur integrasi militer NATO. Hal ini tidak lain untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat di NATO dan Eropa terutama dalam menentukan kemandirian Eropa di bidang pertahanan.

Keputusan Perancis untuk kembali masuk dalam struktur integrasi militer NATO merupakan langkah penting yang akan memberikan pengaruh lebih besar bagi Perancis di NATO. Reintegrasi Perancis ke dalam struktur militer NATO sebenarnya telah disambut baik oleh Presiden Barack Obama, yang mengatakan “prinsip-prinsip keamanan Eropa ialah keamanan Amerika dan sebaliknya”, namun komitmen ini tentu saja bergantung dari keputusan Perancis.¹⁵ Tujuan utama Perancis masuk kembali ke dalam struktur integrasi militer NATO ialah untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat di NATO dan Eropa. Sistem pembagian tugas

¹³ Portelli, *Op. cit.*, hal 198.

¹⁴ Pierre Lellouche, Winter, 2010, “European Defense, a challenge for the New Europe,” dalam *MONDES; Les Cahiers du Quai D’Orsay*, No. 2, hal 125.

¹⁵ “Background Note: France”, *Op. cit.*, pukul 09.44 WIB.

dan distribusi tanggung jawab keanggotaan NATO menjadi agenda utama bagi keanggotaan NATO, khususnya Perancis dan Amerika Serikat dalam hal kepemimpinan mereka di NATO.

Pada tahun 2011, Presiden Sarkozy memimpin panggilan untuk intervensi militer di Libya. Dalam kasus ini, Perancis mengambil peran utama dalam upaya stabilisasi keamanan internasional di Libya, sekaligus menjadi titik tolak bagi posisi Perancis sebagai pemain penting di NATO.

Kepemimpinan Perancis dalam misi perdamaian di Libya sekaligus menandai era baru keanggotaan Perancis dalam menyelesaikan misi NATO di luar wilayah Atlantik Utara. Sebelumnya, Perancis berada di luar struktur integrasi militer NATO hingga tahun 2009. Kondisi ini tentu saja memiliki efek signifikan bagi peningkatan struktur dan kualitas militer Perancis, dengan demikian telah mendorong peningkatan postur pertahanan Perancis dan Eropa secara menyeluruh. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mencari strategi baru untuk mencapai kepentingan Perancis di NATO.

Perancis Aktif Kembali dalam Struktur Kepemimpinan NATO

Presiden Nicholas Sarkozy, pertama kali melontarkan gagasan reintegrasi Perancis ke komando militer NATO di Juni 2007, ia menguraikan dua prasyarat: pertama pos komando dijamin untuk perwira senior Perancis dalam Aliansi, dan kedua dukungan Amerika Serikat atas peningkatan identitas pertahanan Uni Eropa.¹⁶ Perancis secara resmi menetapkan prinsip reintegrasi, Sarkozy menugaskan Buku Putih pada Pertahanan dan Keamanan Nasional Perancis, yang diterbitkan pada Maret 2008. Dirancang untuk mempromosikan sebuah identitas independen pertahanan Eropa. Kepentingan Perancis dalam Buku Putih Pertahanan dan Keamanan Nasional jelas menyatakan “Keinginan kuat Eropa berdiri sebagai prioritas semakin kuat. Membuat Uni Eropa sebagai pemain utama dalam manajemen krisis dan keamanan internasional merupakan salah satu prinsip utama kebijakan keamanan Perancis.”¹⁷ Selain itu, Perancis ingin Eropa harus dilengkapi dengan kemampuan militer dan sipil yang sesuai.¹⁸ Hal tersebut membuat redefinisi tanggung jawab pembagian antara Amerika dan Eropa merupakan sebuah penolakan eksplisit gagasan bahwa Uni Eropa bertindak sebagai pelengkap sipil untuk

¹⁶ “Debate Still Open on NATO Integration: French Defence Officials,” Agence France-Presse, September 25, 2007.

¹⁷ “French White Paper on Defence and National Security, June 2008”, *Op. cit.*, Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ *Loc. cit.*

NATO, dan sebuah preferensi yang kuat untuk meningkatkan teknologi pertahanan Eropa. Pandangan Perancis, prinsip-prinsip pertahanan Eropa adalah menjadi bagian dari Pertahanan Perancis dan bagi negara Eropa lainnya.

Pada bulan Juni 2008, Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy mengumumkan dokumen tambahan yang menguraikan inisiatif kebijakan Paris untuk berintegrasi ke dalam struktur integrasi militer Eropa. Hal ini menyajikan unsur-unsur utama dari identitas pertahanan Uni Eropa, termasuk di dalamnya adalah: **pertama** sebuah markas operasi permanen di Brussel, **kedua** pendanaan untuk setiap operasi militer Umum Uni Eropa, dan **ketiga**, program pertukaran personil militer Eropa.¹⁹ Ketiga poin penting ini merupakan tambahan bagi kebijakan Perancis seperti yang tertuang dalam Buku Putih Perancis, sekaligus sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan politik luar negeri Perancis di NATO dan juga di Eropa.

Strategi Perancis dalam mewujudkan kepentingan dalam NATO yaitu dengan jalan memperkuat sistem pertahanan Eropa melalui peningkatan postur militer uni Eropa di Eropa. Termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan Perancis dalam memasukkan perwira Perancis dalam dua posisi Komando Senior Aliansi, yaitu *Allied Command Transformation* (ACT): satu dari dua komando tertinggi NATO yang berbasis di Norfolk, Virginia dan *Joint Command Lisbon* (JCL): satu dari tiga markas operasi utama NATO, juga termasuk Komando Pasukan Reaksi Cepat NATO. Proses ini telah menjadi langkah penyesuaian Perancis dalam mencapai kepentingan nasional di NATO. Dengan demikian, cita-cita Eropa seperti yang tertulis dalam Buku Putih Perancis bisa terwujud.

Simpulan

Perancis merupakan salah satu negara pendiri NATO pada tahun 1949, awalnya NATO didirikan oleh dua belas negara anggota yang kemudian berkembang menjadi 28 negara anggota hingga saat ini. Pada tahun 1966, Perancis menyatakan mengundurkan diri dari struktur komando NATO dengan alasan inpedensi Perancis dalam bidang pertahanan. Negara Perancis mundur dari struktur komando NATO, tetapi tetap memiliki wakil dalam NATO. Negara Perancis tidak sepenuhnya keluar dari NATO, tetapi Perancis tidak tergabung dalam struktur kepemimpinan

¹⁹ “European HQ Heads Sarkozy Plan for Greater Military Integration,” Ian Taylor and Patrick Wintour, dalam *The Guardian*, June 7, 2008, <http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/07/eu.france>, diakses pada Jum’at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.55 WIB.

NATO. Alasan negara Perancis keluar pada maret 1966 tersebut, dikarenakan presiden Perancis pada saat itu Presiden Charles de Gaulle tidak ingin ikut campur dalam perang.

Pada tanggal 17 Maret 2009 Perancis kembali bergabung dalam struktur kepemimpinan NATO atau Dewan Atlantik Utara yang memiliki otoritas tertinggi dalam NATO yang terdiri dari kepala pemerintahan dari negara-negara anggota NATO. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengumumkan negaranya akan kembali aktif di jajaran komando militer NATO setelah keluar selama 40 tahun dari pakta pertahanan tersebut.

Perancis juga menjadi negara penting dalam berbagai reformasi kelembagaan NATO. Kepentingan Perancis di NATO menjadi agenda baru dalam politik luar negeri Perancis, khususnya di bidang pertahanan. Sebagai salah satu anggota NATO, Perancis telah bekerja secara aktif dengan sekutu untuk beradaptasi di NATO, baik internal maupun eksternal dalam lingkungan pasca Perang Dingin. Dukungan Perancis dalam upaya modernisasi struktur kelembagaan NATO dan memimpin kontributor *NATO Response Force* (NRF) merupakan bagian dari implementasi kepentingan Perancis di NATO. Perancis tertarik untuk membangun kemampuan pertahanan Eropa di luar NATO, termasuk pengembangan kelompok tentara regu-cepat Uni Eropa dan menjadi tulang punggung bagi produksi militer Eropa.

Pada tahun 2009, Presiden Nicholas Sarkozy mendukung penuh pengembangan pertahanan Eropa untuk melengkapi dan memperkuat NATO, yang tujuan intinya tetap pada stabilisasi keamanan Trans-Atlantik. Presiden Nicholas Sarkozy telah menggarisbawahi komitmen Perancis untuk menyelesaikan misi NATO di Afghanistan di luar misi Trans-Atlantik, dimana sekitar 4.000 tentara Perancis dikirim ke Afganistan pada bulan Januari 2011. Sebelumnya, pada Juni 2008 Paris sukses menjadi tuan rumah Konferensi Afghanistan, dan dukungan sukses bagi ketuan-rumahan Perancis menunjukkan bahwa Perancis memiliki kemampuan untuk memimpin misi NATO di luar Trans-Atlantik. Pada tahun 2011, Perancis ikut memimpin operasi militer NATO di Libya, selain itu salah satu bukti keaktifan kembali Perancis di NATO terdapat pada bahasa resmi NATO yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Negara Perancis juga masuk dalam Dewan Atlantik Utara yang merupakan salah satu komando tertinggi di NATO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Augustin, Sankt (2007). *Konrad Adenauer and the European Integration*. Berlin: Konrad Adenauer Foundation.
- Carpentir, Jean dan Francois Lebrun. 2011. *Sejarah Prancis dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20*. Bogor: Forum-Jakarta Perancis
- Chand, S and Company LTD. 2000. *International Encyclopedia of Government and Politics, Vol.2*. New Delhi : Ram Nagar
- Coplin, William D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Hidayat, Kusnadi. 2005. *Pengaruh konflik Yunani-Turki Terhadap Program Kerja NATO(1974-1999)*. S1. Universitas Riau.
- Hugues Portelli, dkk. (2005). *France*. Paris: La Documentation Francaise; Ministere des Affaires etrangeres.
- Macridis, Roy C. 1995. *Foreign Policy in World Politic*. London:Prentice Hall
- Rimanelli, Marco (2009). *Historical Dictionary of NATO and other International Security Organizations*. United States of America: Scarecrow Press, Inc.
- Sarkesian, Sam C., Williams, John Alens and Cimballa, Stephen J. (2008). *US National Security: Policymakers, Processes, and Politics*. United States of America: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Schelling, T. C. (1966). *The Diplomacy of Violence*. New Haven: Yale University Press.
- Victor, S, Papacosma and Mary Ann Heiss. 1995. *NATO in The Post-Cold War Era, Does it Have a Future*. ST. Martin Press. New York
- Yusuf, Sufri (1989). *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ziring, Laurence., Plano, Jack C., Olton, Roy (1995). *International Relation: A Political Dictionary*. California: ABC-CLIO, Inc.

Dokumen

French White Paper on Defence and National Security, June 2008.

NATO Handbook 2006, "NATO's Public Diplomacy Division", Brussel.

NATO New Strategic Concept, 2010.

Jurnal

Chapelle, Bertrand De La. Automne (2010). "Territoire, Puissance et Gouvernance a l'ere Numerique", dalam *MONDES; Les Cahiers du Quai D'Orsay*, No. 5.

Lasas, Ainius (2008). "Restituting Victims: EU and NATO Enlargements through the Lenses of Collective Guilt", dalam *Journal of European Public Policy*.

Mariani, Renato (2004). "Book Review: Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric", dalam *Journal of International Studies*, Vol. 33.

Presse, Agence France (25 September 2007). "Debate Still Open on NATO Integration", dalam *French Defence Officials*.

Spero, Joshua B. (2005). "Resensi Buku: Schimmelfennig Frank, Uni Eropa, NATO dan Integrasi Eropa dan Retorika Aturan", dalam *Review Slavia*.

Internet

Déclaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen De 1789 <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp> pada tanggal 29 juni 2012

"French White Paper on Defence and National Security, June 2008," http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/livre_blanc_press_kit_english_version.pdf, diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 Pukul 10.00 WIB.

"NATO's Vision and Mission" http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_programs.htm, diakses hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 pukul 07.00 WIB

NATO. Pasal Utama NATO terdapat dalam <http://www.nato.org/NATO#column-one> Friday. December 01. 2006. Diakses tanggal 12 Maret 2009

"Overview of U.S. Relations with Europe and Eurasia Testimony", Philip H. Gordon, Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs, House Foreign Affairs Subcommittee

on Europe and Eurasia, Washington, DC, March 10, 2011, <http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2011/158214.htm>, diakses pada hari Jum'at 20 Januari 2012 pukul 11.45 WIB.

“Text of the North Atlantic Treaty, 4 April 1949.”

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_ext_17120.htm, diakses pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2011 pukul 23.30 WIB.

“The State Department's Role in NATO Deterrence and Defense Posture Review (DDPR) and Future Arms Control”, <http://www.state.gov/t/us/176669.htm>, diakses pada hari Jum'at 20 Januari 2012 pukul 10.30 WIB.

“The U.S. and U.K. Must Oppose French Plans to Weaken NATO”, Nil Gardiner Ph.D. Direktur, Sally McNamara, dan Erica Munkwitz (Analisis Kebijakan Senior Eropa di *The Margaret Thatcher Center for Freedom* di *Heritage Foundation*), <http://www.heritage.org/research/reports/2009/02/the-us-and-uk-must-oppose-french-plans-to-weaken-nato>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 Pukul 15.55 WIB

“Vice President Joseph R. Biden, speech at the 45th Munich Security Conference,”

http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=238&, diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.59 WIB.

Media Online

Kariza Devia Gantini, 2012, Revitalisasi Produk Wisata dan Pengembangan, hal 33 terdapat dalam http://repository.upi.edu/operator/upload/s_mpp_0602916_chapter2.pdf diakses pada 1 Juli 2012 pukul 11.19 WIB

Perancis Ingin Gabung Kembali Dengan NATO terdapat dalam <http://www.antara.co.id>, diakses pada tanggal 8 Maret 2010.

”Pidato Perdana Menteri Francois Fillon on France Parlemen, 2009.”

<http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2009-03-21-voa8-85126987.html>, diakses pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 pukul 22.35 WIB.

Setelah 40 Tahun, Perancis Kembali ke Pangkuan NATO. tersedia pada <http://surabayaweb.com>. diakses pada tanggal 15 Desember 2009